

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH

AKHMAD *)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. (3). Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. Adapun hasil penelitian yang di dapatkan dilapangan bahwa nilai *adjust (R-Square/R²)* sebesar 0.393 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus sebagai (X_1) dan pendapatan asli daerah sebagai (X_2) mempunyai pengaruh sebesar 39% terhadap belanja daerah, sedangkan selebihnya 61% dijelaskan variabel - variabel lainnya diluar dan variabel dalam model penelitian. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis pertama dinyatakan terbukti. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis kedua dinyatakan terbukti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan terbukti

Kata Kunci : Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “Merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah”. Di satu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah”

dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut : pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan pusat. Dan metode kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar pusat dan daerah otonom (Ulum 2004:51). Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu :

1. Apakah Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh

- signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah?
 3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah?
- Tujuan Penelitian yaitu
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah?
 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.
 3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah

Pengertian Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Daerah

Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa pengukuran dalam rasio keuangan. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Hal ini juga disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dikhususkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

Untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemda dalam rangka otonomi dan desentralisasi diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (Mardiasmo; 2002b). Anggaran yang merupakan blue print organisasi (Mahmudi; 2011) memberi gambaran tentang pengalokasian dan sumberdaya yang dimiliki suatu

organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausal. Menurut Travers (dalam Umar, 2001:22) metode deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian kausal adalah penelitian untuk menguji hubungan kausalitas antara variabel yang dihipotesiskan sebagaimana dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Se-Sulawesi Tengah.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Dinas Pendapatan Daerah serta kantor-kantor dinas lain yang berkaitan dengan penelitian ini dimana lokasinya adalah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.

Definisi operasional dalam penelitian ini perlu dikemukakan untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Berikut definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Khusus Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.
- b. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada

Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

- c. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja

Se-Sulawesi Tengah. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan yaitu dana alokasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji Pengaruh dana alokasi khusus (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2) terhadap belanja daerah (Y) maka digunakan analisis regresi berganda dengan cara menguji makna dari koefisien regresinya. Berikut hasil pengujian regresi dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Standardized Coefficients Beta	t _{hitung}	Sig
Dana Alokasi Khusus (X_1)	.325	2.274	.030
Pendapatan Asli Daerah (X_2)	.506	3.540	.001
Konstanta = 2.766			
Koefisien Korelasi (R) = 0.627			
Koefisien Determinasi (R^2) = 0.393			
F _{hitung} = 9.727			
Signifikansi = 0.000			

Sumber; data diolah

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Tabel 4.4 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 9.727 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0.00, yang dimana $0.00 < \alpha 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota

khusus dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah.

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing - masing variabel yang dimasukkan dalam model, apakah mempunyai pengaruh signifikan parsial terhadap variabel dependen. Untuk menentukan masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung digunakan uji t. Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut yaitu dana alokasi khusus sebagai variabel (X_1)

menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.273 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.03 dan variabel pendapatan asli daerah sebagai variabel (X_2) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.540 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.00. Kedua variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi $0.00 < \alpha 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut mempunyai pengaruh secara parsial atau masing-masing terhadap belanja daerah kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah sebagai variabel (Y).

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 4.4 di atas maka dapat dibentuk model estimasi dengan menulis persamaan yaitu sebagai berikut :

Adapun asumsi dari hasil model estimasi persamaan dalam regresi berganda yaitu sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 2.766 dapat dijelaskan bahwa apabila dana alokasi khusus sebagai variabel (X_1) dan pendapatan asli daerah sebagai variabel (X_2) diasumsikan bernilai 0 maka belanja daerah (Y) pada kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah akan naik 2.766 apabila variabel lain dianggap konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus sebagai variabel (X_1) sebesar 0.325 berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Y) pada kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga jika dana alokasi khusus meningkat sebesar satu persen maka nilai dari belanja daerah meningkat sebesar 0.325.
- Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah sebagai variabel (X_2) sebesar 0.506 berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Y) pada kabupaten/kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga jika pendapatan asli daerah meningkat sebesar satu persen maka belanja daerah meningkat sebesar 0.506.

Adapun Hasil nilai *R-square* dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya belanja daerah yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *R-Square* sebesar 0.393 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus sebagai (X_1) dan pendapatan asli daerah sebagai (X_2) mempunyai pengaruh sebesar 39% terhadap belanja daerah, sedangkan selebihnya 61% dijelaskan variabel - variabel lainnya diluar dan variabel dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, hal ini menunjukkan bahwa kedua dana tersebut mempunyai manfaat untuk membiayai belanja daerah. Dana

alokasi khusus adalah dana yang merupakan transfer pemerintah pusat ke daerah dimana setiap tahunnya masuk kedalam anggaran belanja negara, dimana dana ini dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk membiayai belanja daerah ketika pendapatan asli daerah tidak mencukupi, akan tetapi mempunyai dampak negatif juga kepada daerah khususnya bahwa daerah tidak bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap pemerintah pusat secara tidak langsung. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, dimana hendaknya pemerintah mampu mengidentifikasi pendapatan daerah itu sendiri seperti pemerintah daerah mampu menetapkan target yang sesuai dengan potensi yang terjadi pada daerahnya sehingga dengan tingginya pendapatan asli daerah itu sendiri maka dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan salah satunya adalah belanja gaji pegawai negeri sipil/pejabat daerah sedangkan belanja langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai (honorarium kegiatan), belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-sulawesi tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus adalah salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan dimana dana tersebut dimanfaatkan oleh daerah untuk membiayai belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai seperti pembayaran gaji pegawai negeri sipil yang dilakukan setiap bulannya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dana alokasi khusus setiap tahun mengalami peningkatan. Salah satu meningkatnya dana tersebut dikarenakan setiap tahun jumlah pegawai yang berada pada pemerintah daerah meningkat secara signifikan selain itu juga dana alokasi khusus digunakan untuk program-program yang bersifat nasional dalam mendukung keberhasilan program pemerintah pusat seperti pembiayaan belanja pendidikan dan kesehatan. Belanja pendidikan biasanya dikeluarkan untuk membiayai belanja operasional sekolah (BOS) sedangkan belanja kesehatan dikeluarkan untuk membiayai pegawai tenaga medis/fungsional kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana perimbangan bahwa DAK untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan

tugas ke pemerintahan dibidang tertentu khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Penggunaan Dana perimbangan Khususnya DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan - peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-sulawesi tengah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan asli daerah sangat besar khususnya pada belanja langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dimana pembiayaannya dilakukan terhadap keberhasilan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, salah satu manfaat dari pendapatan asli daerah adalah pembiayaan kebutuhan barang dan jasa kegiatan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Elita Dewi, dalam Maemunah 2006 yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan data empiris yang di dapatkan dilapangan yaitu sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis pertama dinyatakan terbukti.

2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah , sehingga hipotesis kedua dinyatakan terbukti.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan terbukti

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus meningkatkan target terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah agar mempunyai manfaat besar baik bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah maupun mempunyai manfaat untuk Belanja Daerah khususnya Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah daerah harus dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dana transfer. Olehnya itu dalam pembiayaan pembangunan di daerah Pemerintah daerah harus dapat menyediakan kebutuhan dana sendiri.
3. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial harus ditingkatkan penagihannya yakni meninjau kembali besaran penetapan Pajak dan masing – masing objek Pajak Daerah dan jika nilainya tidak sesuai lagi dengan fakta dilapangan segera dilakukan perhitungan penetapan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Basry, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Bratakusuma, Sholikin. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2006. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Editorial Media Indonesia. *Menggenjot Belanja Modal*. 25 Agustus 2008.
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Multivariat SPSS*. Penerbit BP Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Hamzah, 2007. "Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran". Simposium Akuntansi & Keuangan Sektor Publik Pertama Pasca Sarjana UPN Veteran. Surabaya.
- Hari Adi, Priyo. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah". Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Indriantoro, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. *The Political Economy of Public Expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change* Chicago. Vol. 49.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordhaus, Samuelson. 1992. *Mikro Ekonomi*. Edisi Keempatbelas. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Oates, Wallace E. 1995. *Comment on "Conflict and Dilemmas of Decentralization"* by Rudolf Holmes. *The World Bank Research Observer*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sidik, Macfud & Robert Simanjutak. 2002. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Stine, William F. 1994. *Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence from Pennsylvania Country Government in an Era of Retrenchment*. *National Tax Journal*, Vol. 47 No. 4.
- Sukirno, Sadono. 1991. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Kebijakan*. Penerbit FE2UI dan Bina Grafika. Jakarta.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Daerah www.depkeu.go.id
- * Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat Palu